

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH KABUPATEN PROPINSI DI SUMATERA UTARA

Rusiadi; Ade Novalina

Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract

This study aimed to analyze the impact of the implementation of fiscal decentralization on inequality in the region of 5 districts in North Sumatra during a four-year implementation period. Variables examined its effect on inequality is the region's economic growth and the degree of fiscal decentralization of 5 districts in North Sumatra Province, using panel data regression model equations (panel regression). Results of the analysis concluded that the positive effect of economic growth and statistically significant at 1% of the inequality in the region of 5 districts in North Sumatra Province. Meanwhile for the negative effect of fiscal decentralization but statistically significant at 3% of the region inequality between districts in the province of North Sumatra. During four years of fiscal decentralization in the province of North Sumatra is empirically provable that inequality territory of 5 districts in North Sumatra province decreased each year between 5 districts in North Sumatra province.

Keywords : Fiscal decentralization, Regional Economic Growth, Regional Disparities

I. PENDAHULUAN

Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002). Otonomi daerah tidak hanya berhenti pada pembagian dana pembangunan yang relatif “adil” antara pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan (*balancing fund*), tetapi keberhasilan otonomi daerah juga diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh sebab itu, implementasi otonomi daerah tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemerintah daerah, yakni Bupati atau Walikota serta perangkat daerah lainnya, tetapi juga seluruh masyarakat lokal di tiap-tiap daerah.

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal hanya mampu meningkatkan pertumbuhan daerah tanpa disertai dengan pemerataan pendapatan antar wilayah. Dengan kata lain, pelaksanaan desentralisasi fiskal disamping memacu pertumbuhan juga disertai dengan kesenjangan pendapatan antar wilayah. Seperti kebanyakan kasus di Indonesia, khususnya di Propinsi Sumatera Utara pelaksanaan desentralisasi fiskal telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Meskipun menyebabkan pertumbuhan ekonomi tiap Kabupaten/Kota meningkat, namun di sisi lain ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara juga mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan PAD yang berbeda-beda di setiap Kabupaten/Kota.

Kabupaten Karo kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, menyebabkan peningkatan PAD dan RAPBD yang sangat tinggi. Untuk RAPBD meningkat 66% dari tahun 2000. Sementara Kabupaten lainnya belum bisa memaksimalkan dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan peningkatan pendapatan antar wilayah di Propinsi Sumatera Utara, yang mengakibatkan adanya kesenjangan pendapatan antar wilayah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Belum maksimalnya dampak desentralisasi fiskal menyebabkan terjadinya perbedaan peningkatan pendapatan antar wilayah. Berbedanya peningkatan PAD di setiap kabupaten menyebabkan peningkatan ketimpangan antar kabupaten atau wilayah. Kebijakan desentralisasi fiskal belum sesuai yang diharapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, tenaga kerja dan pajak daerah terhadap ketimpangan wilayah di kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Mengetahui dampak

diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

II. LANDASAN TEORI

Konsep Ketimpangan

Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi. Dalam laporan Pembangunan Dunia tahun 2006, publikasi World Bank, dinyatakan bahwa ketimpangan (baik antar wilayah maupun antar negara) merupakan hal yang penting dalam pembangunan, karena ketimpangan mempengaruhi proses pembangunan jangka panjang. Dua saluran yang digunakan ketimpangan untuk mempengaruhi pembangunan dalam jangka panjang adalah melalui pengaruh- pengaruh kesempatan yang timpang ketika kondisi pasar tidak sempurna dan berbagai kosekuensi ketimpangan untuk kualitas institusi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat.

Spread effect didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (*favorable effect*), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitar. *Backwash effect* didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (*infavorable effect*) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Lebih lanjut, Myrdal mengemukakan ketimpangan regional terjadi akibat besarnya pengaruh *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang.

Perbedaan kemajuan wilayah berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh sehingga yang timbul adalah terjadinya ketidakmerataan antar daerah. Sehubungan dengan hal ini, muncul pendapat dan studi-studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada satu posisi yang dikotonomis.

Salah satu kajian yang menguatkan hipotesis Kuznet tersebut dilakukan oleh Williamson (1965) dalam Tambunan (2003). Williamson untuk pertama kalinya menyelidiki masalah ketimpangan antar daerah dengan membobot perhitungan *coefficient of variation (CV)* dengan jumlah penduduk menurut wilayah. Dalam studinya ia menemukan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi disparitas dalam distribusi pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif maju, misalnya dalam pembangunan industri, infrastruktur dan SDM. Kemudian dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terjadi konvergensi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan mengalami penurunan.

Pengukuran Ketimpangan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi yang dimaksud, diantaranya yaitu:

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak disebuah bujur sangkar yang disisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut.

b. Indeks Gini

Gini atau lengkapnya Corrado Gini merumuskan suatu ukuran untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan personal secara agregatif yang diterima diatas tingkat tertentu. Hasil temuannya sering disebut sebagai *gini coefficient* atau indeks gini. Koefisien gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, yang menjelaskan kadar pemerataan pendapatan. Koefisien yang semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya koefisien yang semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin timpang. Angka rasio Gini dapat ditaksir secara

visual langsung dari kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas area yang terletak diantara kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga OBC. Semakin melengkung kurva Lorenz, akan semakin luas yang dibagi rasio Gini-nya akan semakin besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang semakin timpang. Todaro (1981) dalam Sya'dullah (1999) memberikan batasan, bahwa negara-negara yang ketimpangannya tinggi, maka koefisien Gini-nya terletak antara 0,5-0,7. Sedang negara-negara yang ketimpangannya relatif rendah (merata), koefisien Gini-nya terletak antara 0,2-0,35.

c. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia yang bekerjasama dengan *Institute of Development Studies* menentukan kriteria tentang penggolongan distribusi pendapatan, apakah dalam keadaan ketimpangan yang parah, sedang, atau ringan. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa:

- 1) Jika 40 persen penduduk suatu negara berpendapatan terendah memperoleh sekitar kurang 12 persen jumlah pendapatan negara tersebut maka hal ini termasuk kedalam ketimpangan yang tinggi.
- 2) Kelompok kedua adalah 40 persen dari jumlah penduduk yang berpendapatan terendah, tetapi hanya menerima antara 12-17 persen dari seluruh pendapatan negara. Golongan ini masih dapat dikatakan sebagai keadaan dengan ketimpangan yang sedang.
- 3) Jika golongan penduduk yang 40 persen tersebut memperoleh lebih dari 17 persen dari total pendapatan negaranya, maka tingkat ketimpangannya termasuk rendah.

d. Indeks Williamson

Indeks Williamson ini diperkenalkan oleh Jeffry G Williamson (1965), penghitungan nilai ini didasarkan pada indeks variasi (CV) dan Williamson memodifikasi perhitungan ini dengan menimbangannya dengan proporsi penduduk wilayah. Berbeda halnya dengan indeks gini yang menghitung nilai distribusi pendapatan seluruh rumah tangga dalam suatu daerah atau negara, indeks Williamson ini dapat melihat besarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah dalam sebuah wilayah.

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana tingkat kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan permasalahan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, tenaga kerja dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, baik secara terpisah maupun secara serentak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Rusiadi, 2013) "Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan statistik inferensial yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan analisis ini adalah mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat". Penelitian ini membahas pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, tenaga kerja dan pajak daerah terhadap ketimpangan wilayah.

Kumpulan data yang sudah diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut: Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara data-data yang telah diperoleh, disusun, dikelompokkan, dianalisis, selanjutnya dirumuskan dan dianalisis untuk memberikan gambaran umum yang jelas tentang masalah dan perhitungan yang dilakukan. Metode analisis kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk angka.

Persamaan regresi linier berganda tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

dimana :

Y = Ketimpangan Wilayah

X1= Pertumbuhan Ekonomi

X2= Desentralisasi Fiskal

X3= Tenaga Kerja

X4= Pajak Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Tingkat kesalahan (*error of term*)

IV. PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara parsial terhadap Ketimpangan Wilayah. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara simultan terhadap Ketimpangan Wilayah pada 5 Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. Analisis data yang digunakan dengan menggabungkan data yang bersifat time series dan data silang tempat (*cross section data*). Gabungan kedua jenis data ini menjadi Pooling data. Penulis menguji data penelitian dengan tiga jenis metode estimasi, yaitu *pooled least square* dengan *common intercept*, *Generalized least Square* dengan *Random Effect Model*, dan *Fixed Effect Model* dengan *pooled least square*. Hasil terbaik dengan beberapa pengujian yang akan digunakan oleh penulis dalam mengambil hasil untuk kesimpulan dalam penelitian ini.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode estimasi *pooled least square* dengan *common intercept*, dengan menggunakan software *eviews* versi 7.0, didapatkan hasil sebagai berikut :

Pooled Least Square dengan Common Intercept

Dependent Variable: KW?
Method: Pooled Least Squares
Date: 12/23/15 Time: 15:53
Sample: 2010 2013
Included observations: 4
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE?	0.002929	0.002522	1.161075	0.2608
DF?	0.004612	0.001665	2.770000	0.0126
R-squared	0.488423	Mean dependent var		0.054469
Adjusted R-squared	0.460002	S.D. dependent var		0.038926
S.E. of regression	0.028604	Akaike info criterion		-4.175872
Sum squared resid	0.014728	Schwarz criterion		-4.076298
Log likelihood	43.75872	Hannan-Quinn criter.		-4.156434
Durbin-Watson stat	0.249695			

KW = 0,002929PE + 0,004612DF
SE = (0,002522) (0,001665)
T test = (1,161075) (2.770000)
R-squared 0.488423
Adjusted R-squared 0.460002
S.E. of regression 0.028604
Sum squared resid 0.014728
Log likelihood 43.75872
Durbin-Watson stat 0.249695

Berdasarkan hasil estimasi dengan *pooled least square* dengan *common intercept*, memberikan hasil ada satu variabel yang signifikan pada $\alpha=5\%$, yaitu variabel Desentralisasi Fiskal dengan probabilitas 0,0126 , sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai probabilitas 0,2608. Dari hasil estimasi, R^2 yang dihasilkan dari estimasi persamaan dalam penelitian ini sebesar 48,84% selama masa periode pengamatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan metode analisis *pooled least square* dengan *common intercept*, variasi variabel independent dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 48,84% variasi variabel dependent yaitu ketimpangan wilayah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, sementara sisanya sebesar 51,16% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian.

Selanjutnya penulis mengestimasi data penelitian dengan menggunakan estimasi *pooled least square* dengan *Fixed Effect Model*. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan software *eviews* versi 7.0.

$$\begin{aligned} KW &= 0,048847 + 0,001125PE - 0,000140DF \\ SE &= (8,80E-05) \quad (5,73E-05) \\ T \text{ test} &= (12,77339) \quad (-2,435022) \\ R\text{-squared} &= 0,999 \end{aligned}$$

Menurut hasil estimasi persamaan dengan menggunakan *Fixed Effect Methode* untuk ketimpangan wilayah antar Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara diperoleh R^2 sebesar 99,98%. Dari hasil ini dapat berarti keseluruhan variabel bebas yang tercakup dalam persamaan mampu untuk menjelaskan variasi ketimpangan wilayah di Kabupaten Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil persamaan dapat diketahui kedua variabel berpengaruh signifikan pada $\alpha=5\%$ selama masa periode pengamatan yaitu Pertumbuhan Ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,0000 dan Desentralisasi Fiskal dengan probabilitas sebesar 0,0300 .

Hasil dengan menggunakan *Pooled least square* dengan *fixed effect model* memberikan gambaran hasil yang lebih baik secara statistik dibandingkan dengan menggunakan *Pooled least square* dengan *commont intercept*. Namun untuk menentukan pilihan estimasi yang digunakan, penulis melakukan uji Chow. Hasil uji ini diharapkan dapat diketahui pilihan yang lebih tepat antara *Pooled Least Square* dengan *Common Intercept* atau *Pooled Least Square* dengan *Fixed Effect Model*.

$$CHOW = \frac{(RSS-URSS)/(N-1)}{URSS/(NT-N-K)}$$

Dimana :

RRSS = *Restricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *pooled least square/common intercept*).

URSS = *Unrestricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *fixed effect*).

N = Jumlah data *cross section* (5 kabupaten)

T = Jumlah data *time series* (4 tahun)

K = Jumlah variabel penjelas (dua)

$$Chow = \frac{(0,014 - 2,91)/5 - 1}{2,91/(5 \times 4 - 20 - 5 - 3)}$$

$$Chow = \frac{-2,896/4}{2,91/12}$$

$$Chow = \frac{-0,724}{0,2425}$$

$$= -2,9855670103$$

Hasil pengujian untuk ketimpangan wilayah kabupaten di propinsi Sumatera Utara memberikan hasil F hitung $-2,9855670103 < F\text{-tabel} (2,26)$ H_0 diterima atau H_a ditolak, sehingga hasil tersebut dapat menggunakan *pooled least square* karena pada model tersebut terdapat efek individu yang artinya masing-masing propinsi tidak mempunyai intercept sendiri.

Berdasarkan hasil uji Chow diketahui bahwa model PLS dapat digunakan sehingga tidak perlu menggunakan asumsi data FEM atau REM. Menurut Judge dalam (Manurung, 2005), ada empat pertimbangan pokok untuk memilih FEM dan REM, yaitu :

1. Jika jumlah *time series* (T) besar dan jumlah *cross section* (N) kecil maka nilai taksiran parameter berbeda kecil, sehingga pilihan didasarkan pada kemudahan perhitungan, yaitu FEM.
2. Bila N besar dan T kecil penaksiran dengan FEM dan REM menghasilkan perbedaan yang signifikan. Pada REM diketahui bahwa $b_{0i} = b_0 + \varepsilon_i$, dimana ε_i adalah komponen acak *cross section*, pada FEM diperlakukan b_0 adalah tetap atau tidak acak. Bila diyakini bahwa individu atau *cross section* tidak acak maka FEM lebih tepat, sebaliknya jika *cross section* acak maka REM lebih tepat

3. Jika komponen error ε_i individu berkorelasi maka penaksir REM adalah bias dan penaksir FEM tidak bias.
4. Jika N besar dan T kecil serta asumsi REM dipenuhi maka penaksir REM lebih efisien dari penaksir FEM .

Berdasarkan pendapat Judge asumsi penelitian $N=5>T=4$ maka model yang dipakai adalah model Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil ini maka penulis menyimpulkan bahwa tehnik estimasi yang lebih baik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *pooled least square* dengan *Random effect Methode*. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan data dengan menggunakan *Panel Data Regression Model* dengan metode *Generalized Least Squares* (GLS) dan *unweighted statistics* serta menggunakan *white heteroscedasticity-consistent standard errors and covariance* untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam pengolahan data antara lain adanya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Analisis panel data ini digunakan karena data-data yang akan diolah merupakan *cross section observation* dan *pooling of time series* yang diperoleh dan diteliti sejalan dengan perjalanan waktu. Model panel data ini memiliki ruang dan dimensi waktu sehingga estimasi variabel dan hasil perhitungan akan memberikan analisis empirik yang lebih luas. Dari data yang diperoleh dan dikumpulkan, panel yang terjadi pada penelitian ini adalah *balanced panel* (panel seimbang) dimana setiap unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama. Untuk mengestimasi model dan proses penghitungan, pada penelitian ini akan digunakan dua pendekatan dari model regresi panel data yaitu pendekatan *Random Effect*.

Langkah berikutnya setelah mengestimasi model adalah dengan melakukan pengujian masalah-masalah ekonometrik. Suatu persamaan dikatakan terdapat gangguan multikolinearitas jika R^2 yang dihasilkan dalam regresi tinggi tetapi hanya sedikit atau bahkan tidak ada variabel bebas yang signifikan pada pengujian t-stat. Berdasarkan pengujian t-stat ternyata semua variabel bebas yang ada didalam model signifikan baik secara parsial maupun secara bersama-sama dengan R^2 yang tinggi. Selain itu, semua tanda koefisien regresi masing-masing variabel menunjukkan secara teoritis searah dengan yang diramalkan sebelumnya. disimpulkan bahwa pada model ini tidak terdapat multikolinearitas.

KW = 0,048807 + 0,001124PE – 0,000134DF

SE = (8,800) (5,730)

T test = (12,76520) (-2,341158)

R-squared = 0,831

Berdasarkan hasil olahan data untuk estimasi persamaan ketimpangan wilayah dengan *Generalized least Square*, mendapatkan hasil yang lebih baik daripada dengan menggunakan *Fixed effect methode* dengan *Pooled Least square*. Kedua variabel penelitian signifikan pada $\alpha=0,05$ mempengaruhi ketimpangan wilayah kabupaten propinsi Sumatera Utara. Variabel tersebut adalah PE pada probabilitas $\alpha=0,0000$ dan DF pada probabilitas $\alpha=0,0317$.

Hasil olahan data untuk estimasi persamaan ketimpangan wilayah kabupaten propinsi Sumatera Utara dengan *Random Effect* pada *Generalized List Square*, R^2 hasil Estimasi persamaan adalah 83,16%. Hasil estimasi ini dapat diartikan bahwa model dengan tehnik estimasi persamaan GLS dapat menjelaskan variasi persamaan variabel independent terhadap variabel dependent sebesar 83,16%. Sementara sisanya ketimpangan wilayah kabupaten propinsi Sumatera Utara sebesar 16,84% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini. (Rusiadi; Novalina, 2018).

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan judul penelitian ini yaitu Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten Propinsi Sumatera Utara) dalam hal ini Kabupaten Tapanuli Selatan, Labuhanbatu, Simalungun, Deli Serdang dan Langkat dengan menggunakan *Random Effect Methode* dengan *Generalized least Square* dapat disimpulkan : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di Kabupaten Propinsi Sumatera Utara diketahui positif dan signifikan, sehingga dinyatakan pengaruh pertumbuhan ekonomi sangat besar terhadap ketimpangan wilayah kabupaten di propinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Altito R. Siagian (2010) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini disebabkan saling berbedanya kemampuan antar masing-masing daerah atau wilayah

di Propinsi Sumatera Utara dalam hal pertumbuhan ekonomi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah juga akan mendorong peningkatan ketimpangan wilayah. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap ketimpangan wilayah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara diketahui berpengaruh negatif tetapi signifikan. Berbedanya tingkat pendapatan asli daerah di setiap wilayah mengakibatkan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah antar kabupaten propinsi Sumatera Utara. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Altito R. Siagian (2010) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Propinsi Jawa Barat. Desentralisasi fiskal mendorong pendapatan per kapita di daerah-daerah tersebut semakin meningkat. Secara umum akan menurunkan ketimpangan, peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan mendorong ketimpangan semakin rendah.

Daftar Pustaka

- Tulus T.H. Tambunan. (2003). *Perekonomian Indonesia Beberapa Permasalahan Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kenneth Davey. (1989). *Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Syarif Hidayat. (2004). *Tinjauan Literatur Tentang Konsep Dasar, Pengalaman Negara Lain, dan Dinamika Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: PPE-LIPI.
- Machfud Sidik. (2002). *Kebijakan, Implementasi, dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Yogyakarta.
- Boediono. (2002). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal*. Jakarta.
- M.L. Jhingan. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Makmun Sya'dullah. (1999). *Dampak Pengalokasian DIP dan Inpres terhadap Distribusi Pendapatan*. Jakarta: PPE- LIPI.
- Mudrajat Kuncoro. (2003). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP-APN-YKPN.
- Thomas Nugroho. (2004). *Disparitas Pembangunan Wilayah Pesisir Utara dan Selatan Jawa Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang Subang - Garut Ciamis)* [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Uneversitas Gajah Mada.
- Sjafirizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *PDRB Propinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota*. Sumut: Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. *Sumatera Utara Dalam Angka 2008-2013*. Sumut: BPS.
- Hirschman, Alberto. (1970). *Teori dan Praktek Otonomi Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Jinghan, M L. (1990). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rusiadi. (2013). *METODE PENELITIAN, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisrel*. (A. Novalina, Ed.) (1st ed.). Medan: usu press.
- Rusiadi; Novalina, A. (2018). Monetary Policy Transmission : Does Maintain the Price and Poverty Stability is Effective? *Jejak Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Journal of Economics and Policy*, 11(102), 78–78.
- Rasyid, M. Ryaas. (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Lembaga Pengetahuan Indonesia.
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus. (1994). *Pembangunan Ekonomi* (edisi Terjemahan). Edisi ke-12. Jakarta: Erlangga.
- Situmorang, Syafrizal Helmi. Doli Djafar, Iskandar Muda, Muslich Lutfi, Syahyunan, (2008). *Analisis Data Penelitian (Menggunakan Program SPSS)*. Medan: USU Press.